



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ADI SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
3. NHK : **464364**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 788.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/93 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah Seluas 723 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 206.055.000
3. Tanah Seluas 797 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 227.145.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 379.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV 1.5 CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 201.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOTOR, HONDA H1B0202N42LOAT/ SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 334.500.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	897.849.489
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.400.049.489
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.400.049.489

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.